

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KELURAHAN KEMBANG HARUM

Nurrahma Gustiarni^{1*}, Ranggi Ade Febrian²

^{1,2}Universitas Islam Riau

¹nrhmgstrn@gmail.com

Received: 10-02-2026

Revised: 05-03-2026

Approved: 25-03-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model Miles & Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah berjalan cukup baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu, serta penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan yang belum optimal sehingga mempengaruhi efektivitas program. Simpulan penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sarana, partisipasi masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan agar upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah kesehatan masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama karena adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, dan perilaku hidup sehat yang belum merata. Penyakit menular dan tidak menular masih terjadi secara signifikan, sementara masalah kesehatan ibu dan anak tetap memerlukan perhatian serius. Di antara banyak persoalan tersebut, stunting menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan suatu negara. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama, di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya, yang diakibatkan oleh pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, masalah ini tergolong masalah yang serius. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan UNICEF terdapat 149,2 juta anak menderita stunting, dan Indonesia masuk ke dalam 5 besar Negara dengan jumlah anak yang mengalami stunting tinggi (UNICEF, 2020). Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan saat ini dan produktivitas anak di masa dewasanya. Oleh karena itu, pencegahan stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek keseimbangan gizi saja, namun juga

melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek lain seperti akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, edukasi tentang pola makan seimbang, dan upaya peningkatan status ekonomi masyarakat (Kemenkes, 2021).

Di Indonesia berbagai faktor dapat menyebabkan permasalahan gizi buruk. Faktor-faktor tersebut antara lain tingginya tingkat kemiskinan, kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan kurang optimalnya kolaborasi lintas sektor dan program, menurunnya partisipasi masyarakat, terbatasnya akses keluarga miskin terhadap pangan, tingginya angka penyakit menular, kualitas pola asuh ibu yang kurang memadai, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar. Dengan kondisi tersebut, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Stunting pada balita perlu mendapatkan perhatian khusus. Penyelesaian permasalahan stunting sangat penting karena stunting pada anak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan otak sehingga menyebabkan potensi kecerdasan kurang optimal dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Selain itu, anak yang mengalami stunting juga memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, gagal ginjal, kanker bahkan kematian. Oleh karena itu, permasalahan stunting memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar dapat diatasi dengan baik (Soetjiningsih, 2012).

Kesehatan merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan nasional, karena kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan masyarakat sejak usia dini. Anggaran kesehatan menjadi fondasi utama dalam upaya memperbaiki layanan kesehatan dan mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan akses layanan, memperkuat program gizi, serta memastikan pemantauan tumbuh kembang anak berjalan lebih optimal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki program penanggulangan stunting berfokus pada intervensi gizi spesifik dan sensitif, termasuk pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani, suplementasi tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil, serta pemeriksaan kehamilan dan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Selain itu, Kemenkes juga melakukan koordinasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting dan promosi kesehatan (Kemenkes, 2023). Dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius terkait kasus stunting pada balita. Selama beberapa tahun terakhir, angka stunting di Riau menunjukkan penurunan, terutama pada periode 2021 hingga 2023. Namun, kondisi tersebut mengalami perubahan pada tahun 2024.

Tabel 1.
Data balita stunting di Provinsi Riau pada tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Balita	Prevalensi Stunting	Jumlah Balita Stunting
2021	612.354	22,3%	136.545
2022	617.103	17,0%	104.907
2023	596.119	13,6%	81.072
2024	590.700	20,1%	118.730

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah balita di Provinsi Riau mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2024, sementara prevalensi stunting sempat mengalami penurunan signifikan dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 13,6% pada

tahun 2023, yang mengindikasikan adanya keberhasilan program penanggulangan stunting. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali prevalensi menjadi 20,1% yang diikuti dengan naiknya jumlah balita stunting dari 81.072 menjadi 118.730 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih belum stabil dan memerlukan evaluasi serta penguatan kebijakan agar upaya penanggulangan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau, dengan kondisi geografis menjadikan Indragiri Hulu memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi balita dan ibu hamil. Dalam beberapa tahun terakhir, isu stunting menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena masih ditemukan kasus balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat faktor gizi, pola asuh, dan lingkungan.

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini mengatur sasaran intervensi, strategi pendekatan, pembagian tugas lintas perangkat daerah, peran kecamatan, kelurahan, desa, serta keterlibatan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Melalui intervensi spesifik seperti pemenuhan gizi ibu hamil, balita, dan remaja putri serta intervensi sensitif seperti penyediaan sanitasi, akses air bersih, layanan pendidikan, dan perlindungan sosial, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menegaskan langkah terstruktur dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan (Hulu, 2022). Peraturan ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, penguatan data, peningkatan kapasitas aparatur, serta rembuk stunting tahunan sebagai mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja daerah dalam percepatan penurunan stunting.

Tabel 2.
Data Balita Stunting Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Kampar	25,7%	14,5%	7,6%	16,2%
2.	Kab. Indragiri Hulu	23,6%	16,7%	12,7%	20%
3.	Kab. Bengkalis	21,95	8,4%	17,9%	12,5%
4.	Kab. Indragiri Hilir	28,5%	28,5%	18,8%	25%
5.	Kab. Pelalawan	21,2%	11,2%	10,1%	16,8%
6.	Kab. Rokan Hulu	25,8%	22%	15,9%	21,4%
7.	Kab. Rokan Hilir	29,7%	14,7%	16,6%	24,5%
8.	Kab. Siak	19%	22%	10,4%	16,2%
9.	Kab. Kuantan Singingi	22,4%	17,8%	23%	23,1%
10.	Kab. Kepulauan Meranti	23,3%	17,5%	19,6%	18%
11.	Kota Pekanbaru	11,4%	16,8%	8,7%	14,5%
12.	Kota Dumai	23%	12,8%	14,9%	16,9%

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel diatas, saat ini tingkat Stunting di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 20%, mengalami peningkatan dibanding dengan angka tahun sebelumnya sebesar 12,7%. Fenomena ini memerlukan perhatian yang serius agar tidak terjadi peningkatan kasus pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perlu terus ditingkatkan agar target Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 dapat tercapai. Kecamatan Pasir Penyau merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Pasir Penyau masih menghadapi permasalahan kesehatan terutama permasalahan stunting. Kecamatan pasir penyau memiliki unit pemerintahan

yaitu 8 Desa dan 5 kelurahan yang di mana masih terdapat permasalahan stunting yang cukup tinggi.

Tabel 3.
Data stunting pada Desa/Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu

No	Desa & Kelurahan	2023	2024	2025
1.	Desa Pasir Keranji	16	12	14
2.	Desa Candirejo	16	6	4
3.	Desa Dusun Gading	2	5	1
4.	Desa Petalongan	12	12	10
5.	Desa Jatirejo	11	10	2
6.	Desa Batu Gajah	15	3	1
7.	Desa Serumpun Jaya	5	7	8
8.	Desa Air Molek 2	7	0	1
9.	Kelurahan Sekar Mawar	1	3	1
10.	Kelurahan Kembang Harum	3	3	5
11.	Kelurahan Tanah Merah	2	1	0
12.	Kelurahan Tanjung Gading	14	2	2
13.	Kelurahan Air Molek 1	14	1	1

Data stunting pada desa dan kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu tahun 2023–2025 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan pada sebagian besar wilayah, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa desa. Penurunan yang signifikan terlihat pada Desa Candirejo, Desa Batu Gajah, Desa Jatirejo, serta Kelurahan Tanjung Gading dan Kelurahan Air Molek 1 yang berhasil menekan angka stunting hingga tahun 2025. Namun demikian, terdapat pula wilayah yang mengalami peningkatan, seperti Desa Serumpun Jaya dan Kelurahan Kembang Harum, yang menunjukkan bahwa penanganan stunting belum merata di seluruh wilayah. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan stunting telah menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi masih diperlukan peningkatan intervensi serta pemerataan program agar penurunan angka stunting dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam upaya menanggulangi peningkatan angka stunting di Kelurahan Kembang Harum, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu memperkuat kebijakan dan pelaksanaan program secara terpadu. Pemerintah memastikan ketiga lembaga ini memiliki tenaga pelaksana yang cukup, dukungan anggaran, pedoman kerja yang jelas, fasilitas pendukung yang memadai, serta bahan penunjang yang diperlukan agar program stunting dapat berjalan efektif. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh intervensi gizi dan kesehatan mampu. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, penanggulangan stunting di Kembang Harum dilakukan dengan program yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi seimbang, serta pemantauan tumbuh kembang secara rutin. Melalui berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kehamilan, pemantauan balita, pemberian makanan tambahan, imunisasi, edukasi gizi, dan kunjungan rumah, intervensi stunting dapat berjalan lebih terarah. Pelaksanaan program ini memastikan keluarga di Kelurahan Kembang Harum mendapatkan layanan kesehatan yang berkelanjutan sehingga upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dicapai secara lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Adapun permasalahan dalam penanggulangan stunting di kelurahan kembang harum yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan orang tua, terutama mengenai

pemenuhan gizi seimbang, pola asuh yang benar, serta rendahnya partisipasi ibu dalam mengikuti sosialisasi dan penyuluhan yang diselenggarakan pemerintah.

- 2) Kurangnya pemantauan tumbuh kembang pada balita yang terindikasi stunting, karena tidak semua keluarga membawa anak secara rutin ke posyandu, sehingga deteksi dini dan intervensi gizi tidak berjalan maksimal.
- 3) Keterbatasan dukungan kebijakan dan fasilitas kesehatan, seperti pengalokasian anggaran yang belum teratur untuk alat ukur stunting di mana Posyandu Bougenville menjadi satu-satunya fasilitas yang tersedia di Kelurahan Kembang Harum.

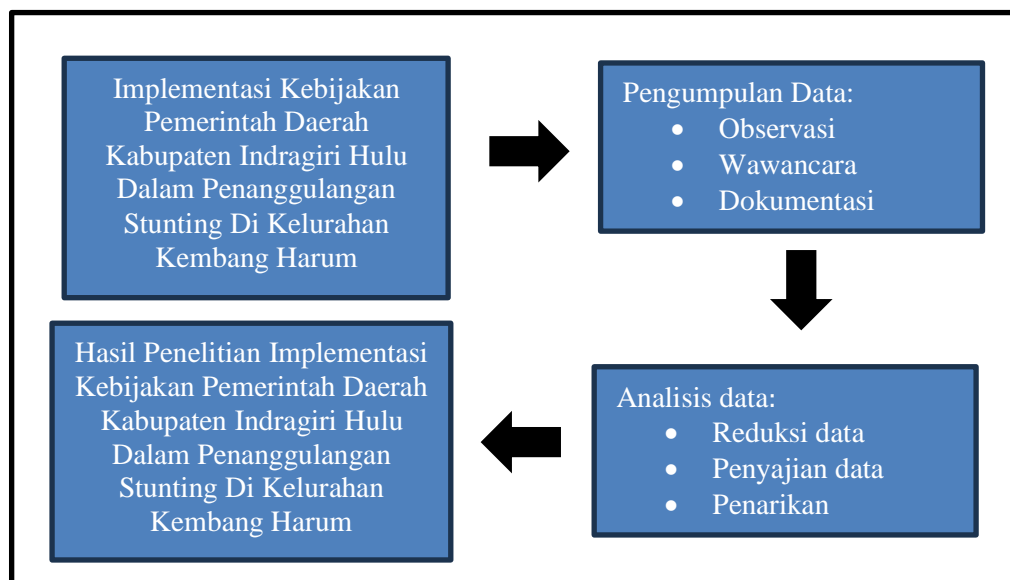
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya strategis yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua melalui sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif serta berkelanjutan mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pemantauan tumbuh kembang balita dengan mendorong partisipasi aktif keluarga untuk rutin datang ke posyandu, sehingga deteksi dini dan intervensi gizi dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan dukungan kebijakan dan fasilitas kesehatan, khususnya dalam hal pengalokasian anggaran yang memadai serta penambahan sarana dan prasarana seperti alat ukur stunting dan jumlah posyandu, agar pelayanan kesehatan bagi balita dapat lebih merata dan efektif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe deskriptif, yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2014) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok, penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam buku (sugiyono, 2024) :

- 1) *Data collection* (Pengumpulan Data)
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi)..
- 2) *Data Reduction* (Reduksi Data)
Reduksi data adalah kegiatan merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.
- 3) *Data Display* (Penyajian Data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.
- 4) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten Indragiri Hulu Dalam Penanggulangan Stunting Di Kelurahan Kembang Harum yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum dapat disimpulkan sudah berjalan cukup baik dari aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penyampaian informasi dilakukan secara berjenjang melalui rapat, sosialisasi, posyandu, penyuluhan, dan kunjungan rumah, serta disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan praktik langsung. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman sebagian masyarakat serta partisipasi dan kehadiran yang belum optimal, sehingga perlu peningkatan sosialisasi dan penguatan komunikasi agar program lebih efektif.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum dapat disimpulkan bahwa secara umum sudah tersedia dan cukup mendukung, meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Kader posyandu dinilai cukup membantu meskipun masih perlu penambahan dan peningkatan kapasitas, informasi sudah cukup jelas namun perlu pengulangan, pembagian kewenangan sudah berjalan sesuai peran masing-masing, serta fasilitas seperti posyandu, alat ukur, dan PMT sudah tersedia meskipun

masih terbatas. Namun, secara keseluruhan masih diperlukan peningkatan agar pelaksanaan program lebih optimal.

- 3) Berdasarkan hasil wawancara pada indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa arahan program penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum telah disampaikan secara berjenjang dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana di tingkat kelurahan, bidan, dan kader posyandu melalui kegiatan posyandu dan penyuluhan. Namun, masih terdapat kendala pada pemahaman masyarakat, seperti penyampaian yang terlalu cepat dan banyaknya informasi sekaligus, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih sederhana, perlahan, dan berulang agar dapat dipahami secara lebih optimal.
- 4) Berdasarkan hasil penelitian indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum sudah berjalan cukup baik sesuai SOP dan pembagian tugas yang ada. Kegiatan posyandu seperti penimbangan, pengukuran, pencatatan, dan penyuluhan telah dilaksanakan secara rutin dengan peran masing-masing pelaksana yang cukup jelas. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas, waktu pelayanan, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap alur pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, kejelasan prosedur, dan sarana pendukung agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
- 5) Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum, yaitu:
 - a. Keterbatasan sarana dan prasarana, hambatan ini ditandai dengan masih terbatasnya alat pemeriksaan kesehatan seperti alat ukur dan perlengkapan posyandu, sehingga proses pelayanan dan pemantauan tumbuh kembang anak belum dapat dilakukan secara optimal.
 - b. Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, sebagian orang tua masih belum rutin membawa anak ke posyandu, sehingga pemantauan kesehatan anak tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak pada kurang maksimalnya deteksi dini stunting.
 - c. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan posyandu harus menyesuaikan dengan kondisi dan kesibukan masyarakat, sehingga tidak semua sasaran dapat hadir secara bersamaan dan kegiatan pemantauan tidak selalu berjalan efektif.

KESIMPULAN

Bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan stunting di Kelurahan Kembang Harum telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menunjukkan bahwa koordinasi antar pelaksana seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu sudah berlangsung secara berjenjang serta kegiatan pelayanan seperti penyuluhan, pemantauan tumbuh kembang, dan intervensi gizi telah dilaksanakan secara rutin. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan sarana dan

prasarana kesehatan, masih rendahnya kesadaran serta kedisiplinan sebagian masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu, serta penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting di Kelurahan Kembang Harum sudah memiliki dasar pelaksanaan yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek partisipasi masyarakat, peningkatan fasilitas, serta koordinasi yang lebih efektif agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan dalam menurunkan angka stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Stunting sebagai masalah gizi kronis pada anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Program percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Soetjiningsih. (2012). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UNICEF. (2020). *Child malnutrition and stunting report*. New York: United Nations Children's Fund.
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (2022). *Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 46 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting*. Rengat: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.